

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 TERHADAP PEMEGANG POLIS DALAM PENYELESAIAN KLAIM TERTUNGGAK

Akhmad Kautsar Fattah, Aurora Jillena Meliala, Atik Winanti

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi badan hukum usaha bersama sebagai subjek hukum dan mengevaluasi pertanggungjawaban AJB Bumiputera 1912 terhadap pemegang polis dalam penyelesaian klaim tertunggak (*outstanding claim*). Permasalahan utama bersumber pada kekosongan normatif mengenai batas tanggung jawab usaha bersama, krisis gagal bayar, serta disparitas putusan pengadilan yang merugikan pemegang polis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha bersama di Indonesia merupakan entitas *sui generis* yang menempatkan pemegang polis sebagai anggota sekaligus pemilik. Namun, pengaturannya dalam UU No. 40 Tahun 2014, PP No. 87 Tahun 2019, dan POJK No. 7 Tahun 2023 belum memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pertanggungjawaban dan likuidasi. Kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) secara prosedural sah melalui RUA, tetapi mencederai keadilan substantif karena membebankan kegagalan tata kelola kepada pemegang polis. Berdasarkan studi komparatif dengan sistem *civil law* di Belanda (OWM/BW), Jerman (VVG/VAG), dan Prancis (SAM/*Code des assurances*), diperlukan reformulasi hukum berupa pergeseran dari *Pure Collective Liability* menuju *Limited Mutual Liability Framework*. Rekonstruksi ini mencakup penanda batas tanggung jawab anggota yang eksplisit, skema dana jaminan polis, serta penguatan *strict fiduciary liability* pengurus guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Pemegang Polis, *Outstanding Claim*.

ABSTRACT

LIABILITY OF LEGAL ENTITY BUMIPUTERA 1912 MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY TO POLICYHOLDERS IN THE SETTLEMENT OF OUTSTANDING CLAIMS

Akhmad Kautsar Fattah, Aurora Jillena Meliala, Atik Winanti

This study aims to analyze the legal construction of mutual enterprises as legal subjects and evaluate the legal liability of AJB Bumiputera 1912 toward policyholders in settling outstanding claims. The primary legal issues stem from a normative vacuum regarding member liability limits, default crises, and court decision disparities that prejudice policyholders. This normative legal research employs statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Findings reveal that mutual enterprises in Indonesia constitute sui generis legal entities where policyholders act simultaneously as members and owners. However, current regulations under Law No. 40 of 2014, PP No. 87 of 2019, and POJK No. 7 of 2023 lack legal certainty concerning liability mechanisms and liquidation procedures. While the Benefit Value Reduction (PNM) policy is procedurally valid via General Member Meetings, it compromises substantive justice by shifting management failures onto policyholders. Based on a comparative study of civil law systems in the Netherlands (OWM/BW), Germany (VVG/VAG), and France (SAM/Code des assurances), an urgent legal reformulation is required from Pure Collective Liability to a Limited Mutual Liability Framework. This framework establishes explicit member liability indicators, policy guarantee schemes, and strict fiduciary liability for management to ensure substantive justice.

Keywords: *Legal Responsibility, Bumiputera 1912 Joint Life Insurance, Policyholder, Outstanding Claim.*